

SNAV-6 | PROCEEDING

NO. E-ISSN 2579 - 5031
NO. ISSN 2302 - 741X

SNAV-6 SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI VOKASI 2017

BATAM, 4 - 6 MEI 2017

*“Rekonstruksi Kurikulum
Pendidikan Akuntansi Guna
Meningkatkan Kompetensi Akuntan”*



SNAV telah dijadikan sebagai agenda rutin yang membahas hasil-hasil penelitian bidang akuntansi guna meningkatkan pertukaran informasi dan kemampuan para praktisi, peneliti, pendidik, dan mahasiswa dalam melakukan penelitian di bidang akuntansi.

PROCEEDING

SNAV-6

(Simposium Nasional Akuntansi Vokasi 6)

Tim Reviewer:

Dwi Kartikasari, S.T., M.B.A. (Poltek Negeri Batam)
Ely Kartikaningdyah, S.E., M.Si (Poltek Negeri Batam)
Hendra Gunawan, S.E., M.Sc (Poltek Negeri Batam)
Sinarti, S.E., M.Sc (Poltek Negeri Batam)
Nanik Lestari, S.E., M.S.Ak (Poltek Negeri Batam)
Arif Darmawan, S.E., M.Sc., Ak (Poltek Negeri Batam)
Dr. Nurafni Eltivia S.E., MSA., Ak., CFP., CA (Politeknik Negeri Malang)
Dr. Bahri, S.E., M.Si (Politeknik Negeri Ujung Pandang)
Dr.A.Razak, S.E.,MM.,Ak (Politeknik Negeri Pontianak)
Dr. Evada Dewata, S.E, M.Si, Ak, CA (Politeknik Negeri Sriwijaya)



Diselenggarakan Oleh:
Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Batam



SUSUNAN PANITIA SNAV-6 BATAM, 4-6 MEI 2017

Penanggung jawab	: Dr. Priyono Eko Sanyoto (Direktur Politeknik Negeri Batam)
Pengarah	: Uuf Brajawidagda, S.T., M.T., Ph.D. (Pembantu Direktur I) Bambang Hendrawan, S.T., M.S.M. (Pembantu Direktur II) Muslim Ansori, S.E., M.AK., CPA. (Pembantu Direktur III) Dwi Kartikasari, S.T., M.B.A. (Ketua Jurusan Manajemen Bisnis)
Ketua	: Adi Irawan Setiyanto, S.E., M.Ec. Dev
Wakil Ketua	: Arif Darmawan, S.E., M.Sc.
Sekretaris	: Yulinda, SE., M.Si., M.BA.
Bendahara	: Mega Mayasari S.E., M.Sc.
Publikasi/Dokumentasi	: Adhitomo Wirawan. S.ST., M.BA. Muhammad Ismet Lau, S.Tr.Kom Sugi Hapni Delima, S.E Priki Adimarta, S.S.T. Sobirin, S.Tr.AB. Tiara, S.Tr.Akun. Febrina Wulandari, S.Tr.Akun. Matheus Maruli, S.Tr.Akun. Atiqotun Nisa, S.Tr.AB.
Acara	: Ely Kartikaningdyah, S.E., M.Si. Nur Rahmah Andayani, S.IP., M.Si. Shinta Wahyu Hati, S.Sos., M.AB
Moderator Paralel	: Dwi Kartikasari, ST, M.B.A Nanik Lestari, S.E., M.S.AK Hendra Gunawan, S.E, M.Sc
Penginapan & Humas	: Rusda Irawati S.E., M.Si. Dewi Aprilianingrum
Transportasi	: Novita Anjelina
PIC Lomba	: Rahmat Hidayat S.AB., M.AB. Seto Sulakso Adi Wibowo, S.E., M.Sc. Danar Irianto, S.E., M.Acc., AK Hajan Hidayat S.PSi., M.M.
Tenaga Kesehatan	: Sugito, Rini
IT	: Muhammad Fattahila Rangkuti

TIM REVIEWER

Simposium Nasional Akuntansi Vokasi 6 (SNAV-6)

Tim Reviewer:

- Ely Kartikaningdyah, S.E., M.Si (Politeknik Negeri Batam)
- Hendra Gunawan, S.E., M.Sc (Politeknik Negeri Batam)
- Sinarti, S.E., M.Sc (Politeknik Negeri Batam)
- Nanik Lestari, S.E., M.S.Ak (Politeknik Negeri Batam)
- Arif Darmawan, S.E., M.Sc., Ak (Politeknik Negeri Batam)
- Dr. Nurafni Eltivia S.E., MSA., Ak., CFP., CA (Politeknik Negeri Malang)
- Dr. Bahri, S.E., M.Si (Politeknik Negeri Ujung Pandang)
- Dr.A.Razak, S.E.,MM.,Ak (Politeknik Negeri Pontianak)
- Dr. Evada Dewata, S.E, M.Si, Ak, CA (Politeknik Negeri Sriwijaya)



KATA SAMBUTAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia dan ridho-Nya sehingga, Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV) ke-6 2017 dapat dilaksanakan dengan baik. Selamat datang disampaikan kepada Narasumber, Pemakalah, dan Peserta SNAV-6 di Batam.

Pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang berorientasi kerja dan mengharuskan mahasiswa belajar di dua tempat pembelajaran yaitu di perguruan tinggi dan di industri sehingga terjadi sinergi antara pembelajaran di institusi pendidikan dengan pembelajaran di industri. Keahlian yang dihasilkan melalui jalur vokasi adalah salah satu solusi dalam menghadapi era MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) dan globalisasi. Kualitas pendidikan vokasi dijamin dengan diterapkannya standar pendidikan kejuruan yang dipatuhi secara nasional sebagai acuan proses pembelajaran sehingga institusi pendidikan bersama asosiasi profesi dan industri bertanggung jawab dalam hal menyusun dan mendesain kerangka pendidikan.

Peran politeknik dalam mengawali pembentukan karir akuntan sangat besar, sesuai dengan kebijakan pemerintahan saat ini yang sedang membangun pendidikan vokasi, Politeknik merupakan salah satu perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan yang terampil dan siap kerja dengan sertifikasi kompetensi yang wajib dimiliki oleh lulusan. Pemerintah saat ini gencar melakukan revitalisasi pendidikan profesi dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan pendidikan tinggi di Indonesia. Upaya revitalisasi sangat diperlukan untuk menjadikan pendidikan profesi lebih unggul, kolaborasi antar pemangku kepentingan merupakan kunci utama demi mewujudkan akuntan Indonesia yang berkompeten sehingga akuntan Indonesia bisa memiliki daya saing kuat di era MEA dan persaingan global yang semakin tanpa batas.

Politeknik Negeri Batam pada tahun ini terpilih sebagai tuan rumah penyelenggara Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV) ke-6 yang akan dilaksanakan pada 4-6 Mei 2017. Kegiatan SNAV pertama kalinya diselenggarakan pada tahun 2012 di Politeknik Negeri Semarang telah menjadi agenda tahunan yang rutin diadakan oleh perguruan tinggi vokasi yang menyelenggarakan pendidikan akuntansi. SNAV telah dijadikan sebagai agenda rutin yang membahas hasil-hasil penelitian bidang akuntansi guna meningkatkan pertukaran informasi dan kemampuan para praktisi, peneliti, pendidik, dan mahasiswa dalam melakukan penelitian di bidang akuntansi. SNAV ke-6 yang diikuti oleh banyak perguruan tinggi vokasi se-Indonesia kali ini mengangkat tema “Rekonstruksi Kurikulum Pendidikan Akuntansi Guna Meningkatkan Kompetensi Akuntan”.

Kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Nunuy Nur Afiah, SE,Ak,M.Si,CA (Ketua Kompartemen Akuntan Publik Pendidik IAD) dan Ir.Drs.Asrizal Tatang, MT (Ketua Komisi Sertifikasi dan Lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)) yang telah bersedia menjadi narasumber. Tidak lupa, terimakasih disampaikan kepada para reviewer dan pemakalah baik yang berasal dari Batam maupun luar Batam. Saya sampaikan terima kasih kepada para panitia seminar dan pelaksana atas kerja keras yang telah dilakukan dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV) ke-6 2017.

Batam, 25 April 2017

Dr. Priyono Eko Sanyoto
Direktur Politeknik Negeri Batam



KATA SAMBUTAN KETUA JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI BATAM

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamu'alaikum Wr.Wb. Salam sejahtera,

Puji syukur kami sampaikan ke hadirat Allah SWT karena atas ridha-Nya Jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam dapat menyelenggarakan Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV) ke-6, yang menampilkan hasil riset terbaik di bidang akuntansi vokasi dari seluruh Indonesia. Simposium ini diselenggarakan di bawah koordinasi Forum Komunikasi Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik se-Indonesia dan Forum Direktur Politeknik Se-Indonesia.

Simposium ini adalah wadah untuk *sharing* hasil penelitian bidang akuntansi khususnya yang bersifat terapan (*applied research*). Alhamdulillah, berkat kerjasama semua pihak terlaksanalah Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV) yang Insya Allah, akan terus dilaksanakan rutin setiap tahun. Kendati SNAV di motori oleh Politeknik, namun para pemakalah sangat beragam asal perguruan tingginya, baik dari akademi, sekolah tinggi bahkan dari perguruan tinggi non vokasi. Bersamaan dengan simposium dilaksanakan juga pertemuan Forum Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri se-Indonesia. Yang menarik dari SNAV kali ini adalah adanya inisiatif dari Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik se-Indonesia untuk mengadakannya bersamaan dengan Olimpiade Akuntansi Vokasi (OAV) pertama yang juga diselenggarakan di Batam. Dengan adanya dua kegiatan ini, diharapkan SNAV menjadi lebih baik dan lebih dikenal di kalangan akademisi maupun peneliti bidang akuntansi, serta mahasiswa.

Kami menyadari bahwa simposium ini tidak akan dapat terlaksana tanpa bantuan semua pihak. Kami rnengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas dukungan penuh dari Direktur Politeknik Negeri Batam beserta jajaran pimpinannya. Kami juga rnengucapkan terima kasih atas dukungan dari ketua IAI Wilayah Kepri atas acara ini. Selanjutnya, kami juga rnengucapkan terima kasih atas kerjasama dari Ketua Jurusan Aktintansi Politeknik se-Indonesia dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada *reviewer* dari Politeknik se- Indonesia atas kesediaannya mereviu makalah yang masuk. Teristimewa, kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerja sama rekan-rekan dari Jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam yang telah bekerja keras sehingga simposium ini dapat terlaksana dengan baik. Terakhir, kami juga rnengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah membantu terlaksananya simposium ini tanpa dapat kami sebutkan satu persatu.

Akhir kata, kami berharap semua makalah yang dipresentasikan dalam simposium ini dapat memperkaya khasanah keilmuan akuntansi.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Batam, 25 April 2017
Ketua Jurusan,

Dwi Kartikasari, S.T., M.B.A.

DAFTAR ISI

Susunan Panitia	ii
Tim Reviewer	iii
Kata Sambutan Direktur Politeknik Negeri Batam	iv
Kata Sambutan Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Batam	v
Daftar Isi	vi

ABSTRAK ARTIKEL

SEKTOR PRIVAT

AKMK (AKUNTANSI MANAJEMEN dan KEPERILAKUAN)

P.AKMK-01	Analisis Variabel Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Implementasi Akuntansi Manajemen Lingkungan	2
P.AKMK-02	Faktor-Faktor Penentu Agresivitas <i>Transfer Pricing</i>	21
P.AKMK-03	Akuntabilitas Pemerintah Desa Berbasis <i>Accountability Framework</i> : Sebuah Studi Fenomenologi	46
P.AKMK-04	Interaksi antara <i>Cognitive Entry Behavior</i> dan <i>Instructional Method</i> dalam Pencapaian Kompetensi	56
P.AKMK-05	Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT), Motivasi Kerja, dan Disiplin terhadap Kinerja Pegawai Inspektorat	68
P.AKMK-07	Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Keefektifan <i>Monitoring Control</i> terhadap Eskalasi Komitmen dalam Pengambilan Keputusan Investasi	83
P.AKMK-10	Peningkatan <i>Scorecard</i> dan Mekanisme <i>Self-Explanation</i> untuk Mengurangi Bias dalam Penyusunan BSC	144
P.AKMK-11	Manajemen dengan Kompetensi Pengguna sebagai Variabel Anteseden	156
P.AKMK-12	Potensi Peningkatan Profitabilitas Perusahaan Peternakan Ayam Petelur	170
P.AKMK-13	Pengaruh <i>Management-Employee Relations</i> dan Kompensasi terhadap Kepuasan Kerja Karyawan	179
P.AKMK-14	Dampak Struktur Modal terhadap Kinerja Perusahaan pada Sektor Perbankan	186
P.AKMK-15	Pengaruh Implementasi <i>Green Supply Chain Management</i> terhadap Kinerja Operasional Perusahaan	196

P.AKMK-16	Konflik Keagenan: Tinjauan Teoritis dan Cara Mengurangnya	208
P.AKMK-17	Akuntabilitas pada Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Komunitas Desa di Indonesia	217
P.AKMK-18	Pengaruh Kompensasi dan Kondisi Kerja terhadap Kepuasan Kerja dan Komitmen Dosen pada Perguruan Tingginya	229
P.AKMK-19	Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan dan Keterampilan Usaha terhadap Motivasi Berwirausaha Mahasiswa di Program Studi Akuntansi Politeknik Negeri Batam	240
P.AKMK-20	Pengukuran Proses Transformasi Biologis Pada Komiditi Sapi Potong Di Kabupaten Bone	256

AKPM (AKUNTANSI KEUANGAN dan PASAR MODAL)

P.AKPM-01	Pengungkapan Intellectual Capital di Indonesia	269
P.AKPM-02	Reaksi Pasar Modal Atas Diterapkannya Kebijakan <i>Tax Amnesty</i>	284
P.AKPM-03	Struktur <i>Corporate Governance</i> , Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Perusahaan dan Pengungkapan <i>Enterprise Risk Management</i>	294
P.AKPM-04	Biaya Keagenan, Struktur Modal dan Kinerja Perusahaan	310
P.AKPM-05	Keputusan Penerbitan Sukuk Korporasi Bank Syariah : <i>Perspektif Regulator Decisions Corporation Islamic Bank Sukuk Issuance : Regulatory Perspective</i>	318
P.AKPM-09	Pengaruh Kualitas Audit terhadap Hubungan Pengungkapan <i>Other Comprehensive Income</i> dengan Manajemen Laba pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	375
P.AKPM-10	Analisa Tingkat Keuntungan Menabung Saham sebagai Alternatif Investasi yang Menguntungkan	404
P.AKPM-12	Pengaruh Faktor-Faktor Fundamental terhadap Harga Saham	430
P.AKPM-13	Pengaruh Prinsip Konservatisme Akuntansi terhadap Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> dan Kualitas Laba Perusahaan	438
P.AKPM-14	Dampak Larangan Ekspor Biji (Raw Material atau Ore terhadap Nilai Perusahaan)	454
P.AKPM-15	Hubungan Informasi Akuntansi dan Intellectual Capital terhadap Nilai Perusahaan	463
P.AKPM-16	Analisis Pengaruh <i>Financial Distress, Firm Size, Growth Opportunity, Likuiditas dan Leverage</i> terhadap Aktivitas Hedging Dengan Instrumen Derivatif Valuta Asing	474

AKSR (AKUNTANSI SYARIAH)

P.AKSR-02	Faktor yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Akuntansi Politeknik untuk Berkarir di Lembaga Jasa Keuangan Syariah	516
P.AKSR-03	Determinan Perilaku terhadap Intensi Nasabah Bank Sumsel Babel Syariah	527

GCFA (GOOS GOVERNANCE, CSR, dan FRAUD, & FORENSIC ACCOUNTING)

P.GCFA-01	Akuntansi: Modal Sosial, Sosial Ekonomi, dan Implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) PT Pupuk Kalimantan Timur di Bontang	545
P.GCFA-02	Pengaruh Struktur Pengendalian Internal dan Efektivitas Fungsi Audit Internal terhadap Pencegahan Fraud	564
P.GCFA-04	Pengaruh Environmental Performance dan Environmental Disclosure terhadap Economic Performance	605
P.GCFA-06	Pengaruh Kompetensi Auditor Forensik dan Anti Fraud Program terhadap <i>Fraud Detection Performance</i> Menurut Persepsi Auditor BPK-RI dan KAP di Jakarta	633
P.GCFA-07	Pengaruh Model Corporate Culture dan Dimensi Sustainability Performance terhadap Kualitas Sustainability Reporting	656
P.GCFA-08	Penerapan Tanggung Jawab Sosial Strategik (Strategic CSR) dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia)	678
P.GCFA-09	Analisis Atas Pelaporan Aktivitas Pertambangan dan Pengelolaan Lingkungan Oleh Perusahaan Pertambangan	692
P.GCFA-10	Analisis Penilaian Masyarakat terhadap Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT. Pipa Mas Putih	712

PAK (PENDIDIKAN AKUNTANSI)

P.PAK-01	Revitalisasi Kurikulum Program Studi Diploma Bidang Akuntansi Guna Meningkatkan Daya Saing Lulusan	720
P.PAK-02	Faktor-Faktor Penentu Niat Mahasiswa D-III Akuntansi untuk Memilih Karir Menjadi Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Studi Empiris pada Mahasiswa Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin)	733
P.PAK-03	Efektivitas Implementasi PSG pada DUDI Keahlian Akuntansi (Komparasi : SMK Negeri dan Swasta)	759
P.PAK-06	Jigsaw II Technique in Developing Reading Skill of Accounting	822

Department Students: Pre-Experimental Study

P.PAK-09	Asiknya Metode <i>Role Playing</i> dalam Perkuliahan Sistem Akuntansi (Studi Kasus Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang)	857
P.PAK-10	Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa terhadap Konsep Dasar Akuntansi	870
P.PAK-11	Pengaruh Model Pembelajaran <i>Teams Games Tournament</i> terhadap Prestasi Mahasiswa pada Mata Kuliah Akuntansi Keuangan	884
P.PAK-12	[Re]Konstruksi Pendidikan Akuntansi pada Pendidikan Tinggi Vokasi: Suatu Refleksi Kritis	897
P.PAK-13	Rekonstruksi Pendidikan Vokasi Akuntansi di Era Digital	912
P.PAK-14	Strategi dan Efektivitas Pembelajaran Akuntansi Keuangan (Studi Empiris di Politeknik Negeri Madiun)	922

PPJK (PERPAJAKAN)

P.PPJK-01	Mepengaruhi Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak	935
P.PPJK-02	Pengaruh Derivatif Keuangan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Listed di Indonesia	948
P.PPJK-03	Pengaruh Direktur Independen, Karakteristik Dewan Direksi, dan Kompensasi terhadap Agresivitas Pajak	960
P.PPJK-04	Pengaksesan Data Bank : Target Pajak dan Kerahasiaan Nasabah Menurut Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia	973
P.PPJK-05	Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan P2 di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin	993
P.PPJK-06	Efektifitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggalan Pajak di KPP Pratama Banjarmasin	1004
P.PPJK-07	Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Wilayah Kota Banjarmasin dalam Prespektif UU No 28 Tahun 2009	1013
P.PPJK-08	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Daerah di Kota Banjarmasin	1029
P.PPJK-09	Pengaruh Instrumen Pengalihan Laba terhadap Pemanfaatan Negara Lindung Pajak (Tax Haven Country)	1039
P.PPJK-10	Kepemilikan Investor Asing, Tata Kelola Perusahaan dan Aktivitas Penghindaran Pajak : ASEAN <i>Corporate Governance Scorecard</i>	1060

P.PPJK-13	Persepsi Keadilan dalam <i>Tax Amnesty</i> Menurut Wajib Pajak Orang Pribadi Peserta dan Bukan Peserta <i>Tax Amnesty</i>	1111
P.PPJK-14	Konsekuensi Ekonomis dari <i>Aggressive Financial Reporting</i> dan <i>Aggressive Tax Reporting</i> (Studi Lintas Negara ASEAN)	1128
P.PPJK-15	Eksistensi Pendapatan Asli Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Depok	1142
P.PPJK-16	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak UMKM untuk Memiliki NPWP (Studi Kasus Pengusaha Songket di Kotamadya Palembang)	1159
P.PPJK-17	Pengaruh <i>Book Tax Difference</i> , Volatilitas Arus Kas, Besaran Akrua, Volatilitas Penjualan, Dan Tingkat Hutang terhadap Persistensi Laba	1175
P.PPJK-19	Analisis Pengaruh <i>Information and Communication Technologies Literacy</i> , <i>E-Filing</i> , dan <i>E-Billing</i> terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	1212

P.SIPE (SISTEM INFORMASI, PENGAUDITAN, dan ETIKA PROFESI)

P.SIPE-02	Pengembangan Aplikasi mobile Teller Lembaga Perkreditan Desa Berbasis Android	1249
P.SIPE-04	Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit	1274
P.SIPE-05	Rancang Bangun Sistem Informasi Penjadualan Perkuliahan Berbasis Komputer di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Semarang	1288
P.SIPE-07	Pengaruh Independensi Auditor, Pengalaman Auditor, Struktur Audit dan Kualitas Audit terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas pada Proses Pengauditan Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Yogyakarta)	1313
P.SIPE-08	Ketepatan IFRS, Keahlian Tugas Auditor dan Judgement Framework atas Opini Auditor	1324
P.SIPE-09	Persepsi Akuntan Profesional Mengenai Pentingnya Pendidikan Etika : Bukti Empiris pada Akuntan Profesional di Bali	1337
P.SIPE-10	Rancangan Sistem Aplikasi Perhitungan Harga Pokok Produksi Sistem Kontrak Produk Batik Pekalongan	1345
P.SIPE-11	Analisis Penerimaan Aplikasi <i>Sunfish HR</i> dengan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM)	1360
P.SIPE-12	Perspektif Akuntan Publik Tentang Kualitas Laporan Keuangan, Insentif Bagi Manajemen, Nilai Etis, dan Pengendalian Internal dalam Menyikapi Praktek <i>Creative Accounting</i>	1372
P.SIPE-13	Aplikasi Sistem Pendapatan dan Biaya pada UMKM Kerajinan Mendong Berkah Jaya Temanggung	1391

P.SIPE-15	<i>The Benefit of Mobile Banking: Is There a Time Lag?</i>	1414
P.SIPE-17	Peran Kerjasama Komite Audit, Audit Eksternal dan Dukungan Manajemen terhadap Efektivitas Audit Internal	1422

SEKTOR PUBLIK

P.ASPAK (AKUNTANSI KEUANGAN)

P.ASPAK-01	Sikap dan Perilaku Aparatur Desa Mengadopsi Akuntansi Keuangan Daerah ke Akuntansi Pemerintah Desa di Indonesia	1464
P.ASPAK-03	Determinan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu	1501
P.ASPAK-04	Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2011-2015)	1514
P.ASPAK-05	Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Biologis Perusahaan Taman Wisata di Provinsi Bali	1527

P.ASPAM (AKUNTANSI MANAJEMEN)

P.ASPAM-01	Pengujian Model Hubungan antara Perputaran Kas, Perputaran Piutang dan Perputaran Persediaan dengan Profitabilitas	1619
P.ASPAM-02	Pengaruh Partisipasi Anggaran, Skedul, Sasaran terhadap Kinerja Manajerial dengan Pemoderasi Pengawasan Internal	1636
P.ASPAM-03	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyusunan APBD Berbasis Kinerja pada DPPKAD Kabupaten Tegal	1649
P.ASPAM-04	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Barat	1664

P.ASPGG (AKUNTANSI MANAJEMEN)

P.ASPGG-01	Akuntabilitas Masjid dalam Bingkai <i>Natural Caring</i> Fenomenology Otonomi Khusus Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pendekatan Kualitatif Fiscal Decentralization Theory)	1680
P.ASPGG-02		1698
P.ASPGG-03	Analisis Pengaruh Penggunaan Informasi Barang Milik Negara terhadap Rencana Kebutuhan Tahunan Barang Milik Negara (Studi pada: Politeknik Negeri Jakarta)	1720
P.ASPGG-04	Analisis Kinerja Finansial dan Nonfinansial Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui KJKS BMT	1733

P.ASPSIA (SISTEM INFORMASI DAN AUDITING)

P.ASPSIA-01	Pengaruh Persepsi Keamanan dan Privasi terhadap Minat untuk Menggunakan Internet Banking : Pendekatan <i>Extended Technology Acceptance Model</i> (TAM)	1753
P.ASPSIA-03	Desain Model Matris Penilaian Risiko (Risk Assessment) dalam Perencanaan Audit Umum (Studi pada : Satuan Pengawas Internal (SPI), Bagian Keuangan dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Politeknik Negeri Ujung Pandang)	1797
P.ASPSIA-04	Program Laku Pandai Brilink terhadap Peningkatan Pendapatan Agen Brilink	1822
P.ASPSIA-05	Pengaruh Profesionalisme, Role Stress dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Auditor BPKP Provinsi Bali	1833
P.ASPSIA-06	Studi Fenomenologi atas Dilema Etis Auditor Internal Pemerintah	1850
P.ASPSIA-07	Peran Faktor Risiko Kepabeanaan dalam Mengungkap Temuan Hasil <i>Post Clearance Audit</i>	1873
P.ASPSIA-08	Sebuah Kajian Kandungan Informasi dalam Laporan Pemerintah Daerah : Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Malang	1883
P.ASPSIA-09	Analisis Perbedaan Penerimaan Perilaku Audit Disfungsional Berdasarkan Gender	1900

P.ASPGG (GOOD GOVERNANCE)

P.ASPGG-01	Akuntabilitas Masjid dalam Bingkai <i>Natural Caring</i>	1753
P.ASPGG-03	Analisis Pengaruh Penggunaan Informasi Barang Milik Negara terhadap Rencana Kebutuhan Tahunan Barang Milik Negara	1797
P.ASPGG-05	Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia pada Sektor Informal dan Formal di Taiwan	1833
P.ASPGG-06	Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Program Proyek Operasi Nasional Agraria Studi Kasus Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul Yogyakarta	1850

DAFTAR ARTIKEL PUBLIKASI JURNAL

P.AKMK-06	<i>Total Quality Management</i> terhadap Kinerja Manajerial dengan Sistem Pengukuran Kinerja sebagai Variabel Moderating pada Fajar Grup	Journal of Applied Managerial Accounting Polibatam
P.AKMK-08	Analisis Pengaruh PP 46 Tahun 2013 terhadap Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia Melalui Sektor UMKM	Journal of Applied Accounting and Taxation Polibatam
P.AKMK-09	Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen pada Perilaku Disfungsional	Journal of Applied and Taxation Polibatam
P.AKPM-06	Pengaruh Perataan Laba Melalui Manipulasi Aktivitas Riel terhadap Persistensi Laba	Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis Polibatam
P.AKPM-07	Pengaruh ROA, CAR, NPL, LDR, BOPO terhadap Nilai Perusahaan Bank Umum	Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis Polibatam
P.AKPM-08	Pengaruh Risiko Likuiditas dan Suku Bunga Bank Indonesia terhadap Profitabilitas Perbankan	Jurnal Informasi Akuntansi dan Keuangan (INFAK) Poltek Ujung Pandang
P.AKPM-11	Pengaruh Kebijakan Dividen dan Pertumbuhan Pendapatan terhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Manufaktur	Jurnal Informasi Akuntansi dan Keuangan (INFAK) Poltek Ujung Pandang
P.AKPM-17	Pengaruh Perputaran Modal Kerja, Perputaran Aset dan Efektivitas Penggunaan Dana terhadap Laba Bersih	Journal of Applied Accounting and Taxation Polibatam
P.AKSR-01	Dampak Perubahan Suku Bunga Kebijakan dan Inflasi terhadap Portofolio Pembiayaan Perbankan Syariah	Jurnal Riset Akuntansi Terapan Polsri
P.GCFA-03	Pengaruh Manajemen Laba, <i>Corporate Governance</i> , dan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Journal of Applied Managerial Accounting Polibatam
P.GCFA-05	Deteksi Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintah (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Jember)	Journal of Applied Managerial Accounting Polibatam
P.PAK-04	Perilaku Berbagi Pengetahuan Akuntansi pada Dosen Akuntansi Kota Bengkulu: Pendekatan Theory of Planned Behavior (TPB)	Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis Polibatam
P.PAK-05	Model Aliansi untuk Peningkatan Kualitas	Journal of Applied

	Pembelajaran dan Penyerapan Kerja Alumni	Business Administration Polibatam
P.PAK-07	Evaluasi Proses Belajar Mahasiswa dalam Akuntansi Biaya dengan Strategi Peninjauan Kembali Holly-Wood Squares	Journal of Applied Managerial Accounting Polibatam
P.PAK-08	Perbandingan Nilai Akuntansi Aasa Dagang dan Pengantar Akuntansi 1 pada Dua Kurikulum Berbeda. Studi Kasus: Program Studi Akuntansi Vokasi UI	Journal of Applied Accounting and Taxation Polibatam
P.PPJK-11	Pengaruh Financial Distress, Real Earnings Management dan Corporate Governance terhadap Tax Aggressiveness	Journal of Applied Business Administration Polibatam
P.PPJK-12	Analisis Pengaruh Tax Planning terhadap Ekuitas Perusahaan	Journal of Applied Accounting and Taxation Polibatam
P.PPJK-18	Pengaruh <i>Tax Avoidance</i> dan <i>Board Diversity</i> terhadap Kinerja Perusahaan dalam Perspektif <i>Corporate Governance</i>	Journal of Applied Accounting and Taxation Polibatam
P.SIPE-01	Pengaruh Opini Audit Tahun Sebelumnya dan Kondisi Keuangan Perusahaan terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern	Journal of Applied Accounting and Taxation Polibatam
P.SIPE-03	Pengaruh Jenis, Spesialisasi Industri Auditor, Audittensure, Ukuran Perusahaan terhadap Going Concern Reporting	Journal of Applied Accounting and Taxation Polibatam
P.SIPE-06	Pemaknaan Proses Menuju Opini WTP : Sebuah Etnometodologi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Journal of Applied Accounting and Taxation Polibatam
P.SIPE-14	Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal pada Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Barang di PT. UNISEM Batam	Journal of Applied Business Administration Polibatam
P.SIPE-16	Konsekuensi Penerimaan Opini Going Concern dan Kualitas Auditor terhadap Biaya Utang (Cost Of Debt)	Jurnal Akuntansi, Ekonomi, dan Bisnis Polibatam
P.ASPAK-02	Fenomena Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi	Jurnal Informasi Akuntansi dan Keuangan (INFAK Poltek Ujung Pandang)
P.ASPAK-06	Literasi Keuangan Pelaku UMKM Kota Semarang	Jurnal Informasi Akuntansi dan Keuangan (INFAK Poltek Ujung Pandang)

P.ASPAK-07	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi terhadap penerapan Akuntansi berbasis akrual pada pengelolaan barang milik negara	Journal of Applied Managerial Accounting Polibatam
P.ASPAK-08	Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Inflasi, dan CAR terhadap Penyaluran Kredit UMKM pada Bank Umum di Indonesia Tahun 2007 - 2013	Jurnal Informasi Akuntansi dan Keuangan (INFAK Poltek Ujung Pandang)
P.ASPAK-09	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Journal of Applied Accounting and Taxation Polibatam
P.ASPAK-10	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Belanja Modal pada Tingkat Kemiskinan	Jurnal Riset dan Aplikasi Akuntansi Manajemen (JRAAM) Polinema
P.ASPSIA-02	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Variabel Intervening Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual	Jurnal Riset dan Aplikasi Akuntansi Manajemen (JRAAM) Polinema
P.ASPSIA-10	Analisis Skeptivitas Gubernur DKI Jakarta terhadap Kesahihan Laporan Audit BPK RI Ditinjau dari Standar Pemeriksaan Akuntan	Journal of Applied Accounting and Taxation Polibatam

P.PPJK-05: FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN P2 DI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA KOTA BANJARMASIN

Sufi Jikrillah¹⁾, Asrid Juniar²⁾, dan M. Zainal Abidin³⁾

1,2,3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat

¹⁾ufie_18@yahoo.co.id, ²⁾asridjuniar@unlam.ac.id, ³⁾mzainalabidin@gmail.com

Abstract

Tax are part of the revenue source with the greatest potential to increase therefore, tax are used as a source of state financing and tax revenue targets every year the tax is expected to be further improved. Property tax are rural and urban land and or buildings owned, controlled, and or utilized by the individual or entity, except for the area used for plantation, forestry and mining. Objectives to be obtained from this study is to determine and analyze the attitude of the taxpayer, the views environmental, regulatory, tax payers awareness and knowledge of the taxpayer to the level of PBB P2 building in the district of North Banjarmasin. The sampling technique using propotionate stratified random sampling method with a total sample of 382 respondents. Data were analyzed using multiple regression analysis. Based on the results of data analysis showed that the attitude of the taxpayer, view the environment, regulations, awareness of the taxpayer and the knowledge of taxpayers significantly affect the level of PBB P2 in the District of North Banjarmasin shown with a probability value t is less than 0.05.

Keywords: the level of compliance, taxpayer, PBB P2

Abstrak

Pajak merupakan bagian dari sumber penerimaan negara yang dianggap paling potensial untuk meningkat oleh karena itu, pajak digunakan sebagai sumber pembiayaan negara dan target penerimaan pajak setiap tahun maka pajak diharapkan dapat terus ditingkatkan. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sikap wajib pajak, pandangan lingkungan, peraturan, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan P2 di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *propotionate stratified random sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 382 responden. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil bahwa sikap wajib pajak, pandangan lingkungan, peraturan, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan P2 di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas t hitung kurang dari 0,05.

Kata Kunci: tingkat kepatuhan, wajib pajak, PBB P2

Pendahuluan

Kota Banjarmasin adalah ibukota Propinsi Kalimantan Selatan. Sebagai kota terbesar di Propinsi Kalimantan Selatan maka dituntut untuk bisa membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya melalui kewenangan yang diberikan dalam otonomi daerah dengan menggali segala sumber pendapatan yang potensial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber pendapatan bagi Kota Banjarmasin salah satunya bersumber dari pajak daerah. Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. Pajak daerah yang merupakan salah satu komponen penting penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) disamping retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi daerah itu sendiri, sehingga pembiayaan pembangunan daerah dapat ditutupi dan pada akhirnya kemandirian daerah dapat dicapai.

Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kota Banjarmasin meliputi: 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Pengambilan dan Penggalian C 7. Pajak Parkir 8. PBB P2. Pajak daerah Kota Banjarmasin yang memiliki potensi untuk ditingkatkan yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terutama sektor Pedesaan dan Perkotaan (P2). Kota Banjarmasin yang tumbuh dan berkembang menjadikan Pajak Bumi dan Bangunan (P2) menjadi potensi yang bisa digali untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Kota Banjarmasin terdiri dari 5 (lima) kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Banjarmasin Selatan
2. Kecamatan Banjarmasin Timur
3. Kecamatan Banjarmasin Tengah
4. Kecamatan Banjarmasin Barat
5. Kecamatan Banjarmasin Utara

Berikut ini adalah data ketetapan dan realisasi penerimaan PBB-P2 untuk tahun 2015 :

Ketetapan dan Realisasi Penerimaan PBB P2 Tahun 2015

No	Kecamatan	Ketetapan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Banjarmasin Selatan	2.896.238.698	1.514.208.828	52,28
2	Banjarmasin Timur	4.978.416.921	2.997.501.403	60,21
3	Banjarmasin Tengah	6.946.257.673	5.238.098.587	75,41
4	Banjarmasin Barat	3.426.311.101	2.136.141.628	62,35
5	Banjarmasin Utara	2.552.799.266	1.097.180.335	42,98

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin (diolah 2016)

Berdasarkan data pada tabel 1 terlihat bahwa persentase realisasi penerimaan PBB P2 di Kecamatan Banjarmasin Utara paling rendah persentasenya. Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin terdiri dari 10 Kelurahan, yaitu :

1. Kuin Utara
2. Sungai Miai
3. Pangeran
4. Sungai Jingah
5. Surgi Mufti
6. Alalak Tengah
7. Alalak Utara
8. Alalak Selatan
9. Antasan Kecil Timur
10. Sungai Andai

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak PBB P2 di Kecamatan Banjarmasin Utara.

Kajian Literatur

Pajak merupakan bagian dari sumber penerimaan negara yang dianggap paling potensial untuk meningkat oleh karena itu, pajak digunakan sebagai sumber pembiayaan negara dan target penerimaan pajak setiap tahun maka pajak diharapkan dapat terus ditingkatkan. Dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan, maka pemerintah juga melakukan amandemen pada peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah. Tindakan pemerintah tersebut merupakan peran serta pemerintah dan dukungan pelaksanaan otonomi daerah sehingga hubungan sektor keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah

Tabel 1

menjadi lebih baik. Salah satu amandemen undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia berkaitan dengan pajak adalah amandemen pada Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) UU No.28 Tahun 2009.

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Pengalihan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini adalah titik balik dalam pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota).

Tujuan Pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

1. meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah
2. memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah),
3. memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah,

4. memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, dan menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :

1. digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
2. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional;
3. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
4. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
5. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
6. digunakan oleh badan, atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Untuk pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan dengan menggunakan SPOP.

SPOP sebagaimana dimaksud harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak. Pengalihan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini adalah titik balik dalam pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota).

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, sehingga saat ini Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari sebelas jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dengan pengalihan ini, penerimaan PBB-P2 dan BPHTB akan sepenuhnya masuk ke pemerintah kabupaten/kota sehingga

diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Pada saat PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8 % dan BPHTB hanya mendapatkan 64%. Setelah pengalihan ini, semua pendapatan dari sektor PBB-P2 dan BPHTB akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah.

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak adalah kondisi dimana Wajib Pajak taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka konteks kepatuhan dalam penelitian ini mengandung arti bahwa Wajib Pajak berusaha untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya.

Sikap Wajib Pajak

Sikap mematuhi peraturan perpajakan diukur dengan kemampuan wajib pajak yang menyelesaikan pajak tertunggak apabila masih ada dan memenuhi kewajiban dalam membayar pajak sesuai dengan yang tertera pada SPPT PBB.

Pandangan Lingkungan

Diukur dengan budaya lingkungan sekitar seperti kerabat dekat dan lingkungan disekitarnya yang dapat mempengaruhi keputusan sementara wajib pajak untuk membayar pajak.

Pelayanan Pajak

Diukur dengan kemudahan pelayanan dalam proses pembayaran PBB dan respon pelayanan pajak yang diterima WP setelah menyampaikan permintaan layanan kepada petugas.

Kesadaran Wajib Pajak

Diukur dengan kemampuan wajib pajak untuk memiliki kesadaran bahwa pajak merupakan bagian dari sumber penerimaan negara yang terbesar, kesadaran memenuhi kewajiban pajak dapat menunjang pembangunan, dan kesadaran akan pajak yang menunggak dapat merugikan negara.

Pengetahuan Wajib Pajak

Diukur dengan pemahaman yang dimiliki wajib pajak mengenai sanksi PBB yang akan dikenakan yang disebabkan karena keterlambatan pembayaran pajak.

Hipotesis penelitian ini yaitu :

H1 = Sikap Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PBB P2 di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin

H2 = Pandangan Lingkungan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PBB P2 di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin

H3 = Pelayanan Pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PBB P2 di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin

H4 = Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PBB P2 di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin

H5 = Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PBB P2 di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin

Metode Penelitian

Obyek penelitian ini wajib pajak bumi dan bangunan P2 di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2015. Berikut ini jumlah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) untuk kecamatan Banjarmasin Utara :

Tabel 2
Jumlah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) di Kecamatan Banjarmasin Utara Tahun 2015

No	Kelurahan	SSPD
1	Sungai Jingah	2.940
2	Surgi Mufti	4.692
3	Antasan Kecil Timur	2.157
4	Sungai Miai	5.234
5	Pengeran	2.622
6	Kuin Utara	3.261
7	Alalak Selatan	2.492

No	Kelurahan	SSPD
8	Alalak Tengah	1.925
9	Alalak Utara	7.262
10	Sungai Miai	5.535
Total		38.120

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin (diolah 2016)

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis korelasi, yaitu melakukan korelasi bivariate antara masing-masing indikator dengan skor total konstruk. Jika pvalue rhitung < 0,05, maka indikator pertanyaan valid (Ghozali, 2005 : 47).

Uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji statistik cronbach alpha. Suatu konstrut atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha > 0,60 (Ghozali, 2005 : 42).

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas, menurut Singgih (2002:206-207) uji data dikatakan bebas multikolinieritas apabila :

1. Nilai VIF disekitar atau dibawah angka 10
2. Angka Tolerance mendekati 1

Uji autokorelasi, pengujian terhadap autokorelasi dapat dilakukan dengan uji statistik Durbin Watson.

Uji heterokedastisitas, cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heterokedastisitas adalah dengan uji glejser yaitu meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005 : 108).

Uji normalitas, dapat dilakukan dengan program SPSS, yaitu dengan menggunakan grafik normal plot, jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka data residual terdistribusi normal.

Analisis Regresi

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis statistik melalui program SPSS, rumus statistik yang digunakan adalah Multiple Regression (Regresi Berganda), dimana fungsinya:

$$Y = a + b1SWP + b2PL + b3PP + b4KWP + b5PWP$$

Y = Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

SWP = Sikap Wajib Pajak

PL = Pandangan Lingkungan

PP = Pelayanan Pajak

KWP = Kesadaran Wajib Pajak

PWP = Pengetahuan Wajib Pajak

a = Konstanta

b1 = Koefisien Regresi SWP

b2 = Koefisien Regresi PL

b3 = Koefisien Regresi PP

b4 = Koefisien Regresi KWP

b5 = Koefisien Regresi PWP

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan alat uji yaitu :

Uji F

Uji ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independent (X) terhadap variabel dependent (Y) secara bersama-sama. Tingkat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 95% dengan derajat kebebasan $(df)=(k-1) (n-k)$ atau tingkat kesalahan/alpha $(\alpha) = 5\%$. Jika pvalue $F_{hitung} < 0,05$ maka hipotesis nol (H_0) ditolak.

Uji t

Uji ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel-variabel independent (X) terhadap variabel dependent (Y) secara parsial. Tingkat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 95% dengan derajat kebebasan $(df) = (n - k)$ atau alpha $(\alpha) = 5\%$. Jika pvalue $t_{hitung} < 0,05$, maka hipotesis nol (H_0) ditolak.

Hasil dan Pembahasan

Kecamatan Banjarmasin Utara terdiri dari 10 kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan adalah 16,54 Km². Kelurahan Sungai Andai adalah kelurahan yang memiliki wilayah terluas diantara 9 kelurahan lainnya dengan luas wilayah 3,69 Km² atau mencakup 22,31% dari luas wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara secara keseluruhan. Sedangkan Kelurahan Antasan Kecil Timur memiliki wilayah terkecil dengan luas wilayah 0,66 Km² atau sekitar 3,99% dari luas wilayah Kecamatan

Banjarmasin Utara (Kecamatan Banjarmasin Utara dalam Angka 2016 : 5).

Uji Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan hasil analisis data dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi setelah dilakukan uji validitas hasilnya nilai pvalue r hitung $< 0,05$ sehingga data penelitian valid.

Berdasarkan hasil analisis data dapat dilihat bahwa nilai alpha cronbach setelah dilakukan uji reliabilitas hasilnya $> 0,600$ sehingga data penelitian reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas diperoleh hasil nilai VIF untuk SWP sebesar 1,441, VIF untuk PL sebesar 1,489, VIF untuk PP sebesar 1,674, VIF untuk KWP sebesar 1,211 dan VIF untuk PWP sebesar 1,292. Angka tersebut menunjukkan bahwa nilai VIF kurang dari 10 yang artinya bahwa model regresi tidak ada gejala multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji autokorelasi diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 0,624, maka hasil nilai Durbin Watson yang diperoleh berada diantara nilai $-2 < DW < 2$ yang berarti tidak ada autokorelasi.

Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan hasil analisis data uji heterokedastisitas menunjukkan bahwa nilai pvalue t_{hitung} SWP, PL, PP, KWP dan PWP adalah $> 0,05$ yang menunjukkan bahwa tidak ada gejala heterokedastisitas. Berdasarkan hasil tersebut maka persamaan regresi bisa dikatakan tidak ada gejala heterokedastisitas.

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa titik pada plot mengikuti garis lurus dan tidak ada yang menyimpang, sehingga menunjukkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal.

Pengujian Hipotesis

Uji F

Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai probabilitas F hitung 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa X1, X2, X3, X4 dan X5 bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Y.

Berdasarkan hasil uji F dapat dilihat bahwa sikap wajib pajak, pandangan lingkungan, pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan P2 di kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

Uji t

Berdasarkan analisis regresi berganda diperoleh persamaan regresi yaitu :

$$Y = -2,512 + 0,297 \text{ SWP} + 0,165 \text{ PL} + 0,486 \text{ PP} + 0,320 \text{ KWP} + 0,334 \text{ PWP}$$

Nilai konstanta sebesar -2,512 menunjukkan bahwa jika variabel SWP, PL, PWP, KWP dan PWP tidak mengalami perubahan maka nilai Y akan turun sebesar 2,512 satuan. Sedangkan nilai koefisien SWP sebesar 0,297 menunjukkan jika SWP naik satu satuan maka nilai Y akan naik 0,297 satuan. Nilai koefisien PL sebesar 0,165 menunjukkan jika PL naik satu satuan maka nilai Y akan naik 0,165 satuan. Nilai koefisien PP sebesar 0,486 menunjukkan jika PP naik satu satuan maka nilai Y akan naik 0,486 satuan. Nilai koefisien KWP sebesar 0,320 menunjukkan jika KWP naik satu satuan maka nilai Y akan naik 0,320 satuan. Nilai koefisien PWP sebesar 0,334 menunjukkan jika PWP naik satu satuan maka nilai Y akan naik 0,334 satuan.

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai probabilitas t hitung SWP sebesar $0,000 < 0,05$, nilai probabilitas t hitung PL sebesar $0,004 < 0,05$, nilai probabilitas t hitung PP sebesar $0,000 < 0,05$, nilai probabilitas t hitung KWP sebesar $0,000 < 0,05$, nilai probabilitas t hitung PWP sebesar $0,002 < 0,05$ artinya SWP, PL, PP, KWP dan PWP berpengaruh secara signifikan terhadap Y.

Berdasarkan hasil uji t dapat dilihat bahwa sikap wajib pajak, pandangan lingkungan, pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan P2 di kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil bahwa sikap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan

bangunan P2 di kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Sikap merupakan sebuah ciri yang dimiliki oleh seseorang dalam pembentukan karakter, dimana karakter itu sendiri merupakan prinsip atau pegangan hidup yang dimiliki oleh seseorang dan sifatnya statis atau sulit untuk berubah. Upaya merubah karakter memerlukan usaha hal ini karena sejak lahir individu pada dasarnya telah memiliki karakter sendiri.

Pandangan lingkungan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan P2 di kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Sikap pada seseorang dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu akibat faktor lingkungan. Apabila seorang individu terus-menerus berada pada situasi yang dikelilingi dengan orang-orang yang sikapnya berbeda dengan mereka maka individu tersebut mungkin dapat berubah mengikuti lingkungan tersebut. Apabila orang lain tersebut setuju dengan perilaku individu, maka perilaku ini akan dilanjutkan karena diterima oleh masyarakat. Namun apabila perilaku individu tidak diterima oleh masyarakat, maka hal perilaku tersebut tidak dapat dilanjutkan.

Pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan P2 di kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Pelayanan merupakan bentuk bantuan yang diberikan pada orang lain menggunakan cara tertentu yang membutuhkan kepekaan dan hubungan interpersonal sehingga mampu menciptakan kepuasan dan keberhasilan. Kepatuhan WP dalam membayar pajak dipengaruhi oleh mutu pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak. Peranan yang

petugas pajak tidak hanya menjalankan tugasnya berkaitan dengan perpajakan namun berperan aktif dalam menjaga agar WP tetap patuh dengan memberikan pelayanan yang prima. Petugas pajak yang memiliki tanggungjawab akan pelayanan dapat berinteraksi langsung dengan wajib pajak oleh karena itu, peran petugas pajak dapat memberikan pengaruh terhadap kemampuan WP untuk berperilaku patuh atau tidak. Apabila kualitas pelayanan semakin baik maka akan cenderung

meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Tempat pembayaran pajak di Kota Banjarmasin antara lain :

1. Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin
2. Kantor Kecamatan
3. Loket pembayaran listrik dan PDAM
4. Loket Bank Kalsel

Tempat pembayaran yang bekerja sama dengan pihak perbankan bisa memberikan kepuasan kepada wajib pajak. Hal tersebut disebabkan pelayanan di perbankan sesuai dengan SOP yang lebih transparan dengan fasilitas yang lebih bagus.

Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan P2 di kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Kesadaran adalah proses belajar dari pengalaman dan pengamatan Kesadaran juga merupakan dorongan dari dalam diri individu dengan mempertimbangkan pikiran dan perasaan dari kepribadian yang dimiliki seseorang dalam berperilaku. Kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan maka tingkat kepatuhan pajak juga semakin tinggi.

Pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan P2 di kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan tentang pajak bumi dan bangunan P2 termasuk tata cara pembayarannya menjadi salah satu faktor yang menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan terhadap sanksi yang merupakan bentuk hukuman yang diberikan oleh pemerintah kepada individu yang melanggar peraturan. Bentuk hukuman tersebut dapat berupa denda yang dapat diselesaikan dengan cara membayar sejumlah uang yang sudah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan perundang-undangan. Oleh karena itu, agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh masyarakat, maka harus diberikan sanksi bagi individu yang melakukan pelanggaran sehingga hal tersebut menjadi sebuah

pertimbangan tersendiri bagi wajib pajak. Wajib pajak dapat mematuhi kewajiban untuk pembayaran pajak ketika wajib pajak mempertimbangkan sanksi denda yang akan lebih merugikan. Apabila sisa pajak yang tertunggak dimiliki wajib pajak semakin banyak maka jumlah yang harus dibayar oleh wajib pajak juga semakin besar sehingga wajib pajak akan semakin berat untuk melunasi pajak yang tertunggak tersebut.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Sikap wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan P2 di kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.
2. Pandangan lingkungan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan P2 di kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.
3. Pelayanan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan P2 di kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.
4. Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan P2 di kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.
5. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan P2 di kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian maka diajukan saran sebagai berikut :

Bagi pemerintah daerah :

Hendaknya selalu rutin menyampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan P2 baik itu secara langsung atau tidak langsung sehingga sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak bisa

menciptakan pandangan lingkungan yang baik

Agar selalu meningkatkan kualitas pelayanan pajak terutama dalam kaitan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi yang semakin berkembang harus dipergunakan untuk meningkatkan kualitas layanan seperti penggunaan GPS, penggunaan sistem perbankan yang berbasis teknologi dan sebagainya.

Daftar Rujukan

- Astuti, Puji (2012). *Tingkat Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Wilayah Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang Tahun 2011*
- Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin. 2016. *Kecamatan Banjarmasin Utara Dalam Angka 2016*. Banjarmasin. BPS Kota Banjarmasin
- Dirjen Pajak. 2013. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta. Dirjen Pajak.
- _____. 2013. *Buku Saku Pengalihan PBB*. Jakarta. Dirjen Pajak.
- _____. 2014. *Buku Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)*. Jakarta. Dirjen Pajak.
- Ghozali, Imam. 2005. *Analisis Multivariat SPSS*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hidayah, Niswaton Umul (2013). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Yogyakarta Tahun 2013*
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. CV. Yogyakarta. Andi Offset.
- Materi Presentasi “PengalihanPBB-P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah,” Direktorat Jenderal Pajak. Agustus 2011
- Samudera, Azhari Aziz. 2015. *Perpajakan di Indonesia, Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada
- Santoso, Singgih. 2001. *Mengolah Data Statistik Secara Profesional*. Jakarta. PT.Elex Media Komputindo
- _____. 2012. *Aplikasi SPSS pada Statistik Parametrik*. Jakarta. PT.Elex Media Komputindo
- Siahaan, Marihot Pahala. 2009. *Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta. Graha Ilmu.
- Siti Resmi. 2011. *Buku Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta. Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta. Salemba Empat
- Sugiyono. 1999. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Alfabeta
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Widiastuti, Riana (2014). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan P-2 (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Klaten)*

SNAV-6 PROCEEDING

NO. E-ISSN 2579 - 5031
NO. ISSN 2302 - 741X

BATAM, 4 - 6 MEI 2017

*“Rekonstruksi Kurikulum
Pendidikan Akuntansi Guna
Meningkatkan Kompetensi Akuntan”*



CONTACT

Address :

Pusat Layanan Informasi Lt. 1,
Gedung Utama Politeknik Negeri Batam,
Batam Center, Jalan Ahmad Yani, Kota Batam,
Kepulauan Riau 29461.

Web & Informasi :

www.snavind.org/snav6/
www.polibatam.ac.id